

# **PERSEPSI BIROKRASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) TERHADAP KEPEMIMPINAN BUPATI HJ. SRI MULYANI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN KLATEN PADA PERIODE 2017-2021**

**Nadyla Ayu Suci Rahmadhani**

[ayunadyla@gmail.com](mailto:ayunadyla@gmail.com)

Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Semarang

## **ABSTRAK**

Pemimpin pemerintahan berperan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Bupati merupakan pemimpin pemerintahan di tingkat Kabupaten memiliki kedudukan dan kedekatan emosional yang lebih kuat dengan daerah beserta masyarakatnya. Pada hakekatnya Bupati sebagai pemimpin memiliki korelasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan seluruh bawahannya yang bekerja di lingkungan organisasi yang sama sehingga pada akhirnya hubungan antara Bupati dengan seluruh birokrasi maupun *stakeholders* di luar birokrasi, seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dapat menimbulkan persepsi diantara mereka sebagai pihak yang bekerja dalam ranah yang sama yakni dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya melaksanakan tugas pemerintahan di Kabupaten. Hj. Sri Mulyani sebagai Bupati Kabupaten Klaten selama menyelenggarakan pemerintahannya dengan posisi kekosongan wakil bupati hingga masa kepemimpinannya berakhir. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi birokrasi dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap kepemimpinan Bupati Hj. Sri Mulyani dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Klaten pada periode 2017-2021. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-kuantitatif, data penelitian diperoleh melalui kuesioner, dokumen, dan beberapa sumber yang relevan seperti jurnal dan berupa teori yang berkaitan dengan penelitian ini. Lokasi penelitiannya di Kantor Pemerintah Daerah (Pemda) dan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Klaten. Subyek dalam penelitian ini Sekretaris Daerah, Staf Sekretariat Pemerintah Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Klaten. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yakni persepsi Birokrasi dilihat dari indikator pengarah, motivasi, dan pengambilan keputusan dikategorikan baik, kemudian untuk persepsi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dilihat dari indikator membangun *networking* (jejaring kerja) dan akuntabilitas juga dikategorikan baik.

Kata Kunci : persepsi Birokrasi, Persepsi DPRD, kepemimpinan Bupati, Bupati Kabupaten Klaten

## **ABSTRACT**

*Government leaders play an important role in the administration of government. The regent is the leader of government at the district level and has a stronger emotional position and closeness to the region and its people. In essence the Regent as a leader has a direct or indirect correlation with all his subordinates who work in the same organizational environment so that in the end the relationship between the Regent and the entire bureaucracy as well as stakeholders outside the bureaucracy, such as the Regional People's Representative Council (DPRD) can create perceptions among the people. they are parties who work in the same realm, namely in carrying out their duties and responsibilities in carrying out government duties in the Regency. Hj. Sri Mulyani as the Regent*

*of Klaten Regency during her administration with the vacant position of deputy regent until her leadership term ended. The problem in this study is how the perception of the bureaucracy and members of the Regional People's Representative Council (DPRD) on the leadership of Regent Hj. Sri Mulyani in the administration of government in Klaten Regency in the 2017-2021 period. The research method used is descriptive-quantitative, research data obtained through questionnaires, documents, and several relevant sources such as journals and in the form of theories related to this research. The research location is at the Regional Government Office (Pemda) and the Office of the Regional People's Representative Council (DPRD) Klaten Regency. The subjects in this study were Regional Secretaries, Regional Government Secretariat Staff, and Members of the Klaten Regency Regional People's Representative Council (DPRD). The results obtained from this study are that the perception of Bureaucracy seen from the indicators of direction, motivation, and decision making is categorized as good, then for the perception of Members of the Regional House of Representatives (DPRD) seen from the indicators of building networking and accountability are also categorized as good.*

*Keywords: Bureaucracy perception, DPRD perception, Regent leadership, Klaten Regency Regent*

## **Pendahuluan**

Pada dasarnya proses kepemimpinan seorang pemimpin diharapkan dapat mendukung proses pembangunan pemerintahan, dimana ketepatan dalam proses pembagian tugas dan wewenang secara tepat dapat membantu proses pencapaian

Kepemimpinan seorang kepala daerah merupakan suatu kepemimpinan yang penting dan sangat menarik perhatian publik, karena pada dasarnya seorang kepala daerah dipilih secara langsung oleh masyarakat yang bersangkutan. Terutama Bupati/Walikota sebagai kepala daerah yang memiliki kedudukan sebagai unit langsung yang memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat serta

tujuan yang telah ditetapkan (Octavina, Suryadi, & Rengu). Seorang pemimpin memiliki kedudukan yang sangat strategis terutama dalam menentukan efektivitas pencapaian tujuan organisasi yang dimilikinya.

lebih mengenal daerah dan memiliki ikatan emosional yang lebih kuat dengan daerah beserta masyarakat, benar-benar perlu mengenal persoalan-persoalan pokok mendasar yang dihadapi oleh masyarakatnya didaerahnya masing-masing beserta menemukan solusi pemecahan permasalahannya (Kaloh, 2003).

Dalam suatu organisasi pemerintahan daerah, termasuk daerah Kabupaten/Kota tentunya

seorang Bupati sebagai pimpinan pemerintahan daerah kabupaten memiliki korelasi secara langsung maupun tidak langsung dengan para bawahannya. Dengan demikian, sebagai pihak yang bekerja dalam lingkungan organisasi yang sama tentunya mereka mempunyai persepsi yang berbeda atas perilaku kepemimpinan Bupati sebagai atasan mereka selama proses kepemimpinan tersebut berlangsung.

Pemilihan Bupati di Kabupaten Klaten pada saat Pilkada Serentak pada tahun 2015 sangat menarik perhatian publik. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Hj. Sri Hartini, SE dan Hj, Sri Mulyani yang telah resmi menjadi pemimpin di Kabupaten Klaten merupakan satu-satunya pasangan bupati dan wakil bupati perempuan diantara ratusan pasangan kepala daerah yang lain, sehingga keduanya memperoleh Piagam Museum Rekor Indonesia (Muri) dengan status sebagai pasangan bupati dan wakil bupati perempuan pertama di Indonesia (Liputan6, 2016). Akan tetapi, pada saat kepemimpinannya di tahun 2017 Hj. Sri Hartini, SE selaku Bupati

Kabupaten Klaten terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) dari Komisi Pemberantasan Umum (KPK) terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi berupa kasus suap jual beli jabatan sesuai dengan Tipikor kepada Pengadilan Negeri No. 55-Pidsus-TPK/2017/PN Semarang yang divonis 11 tahun penjara, denda Rp900 juta dengan subsider 10 bulan kurungan (JatengPos, 2017).

Melalui Surat Keputusan (SK) Kementerian Dalam Negeri Nomor 131.33-8601 Tahun 2017, Hj. Sri Mulyani resmi diangkat dan dilantik sebagai Bupati Kabupaten Klaten pada periode 2017-2021 oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo (Kusnaedi, 2017). Pada hakikatnya dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik, Hj. Sri Mulyani sebagai Bupati Kabupaten Klaten selama masa kepemimpinannya tentu saja melibatkan peran birokrasi baik secara langsung maupun tidak langsung untuk membantu dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Oleh karena itu, Bupati Hj. Sri Mulyani tentu saja memiliki

hubungan yang bersifat penting dengan seluruh Birokrasi di Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten sehingga terbentuk persepsi tertentu diantara keduanya.

Berdasarkan hal di atas, persepsi Birokrasi sangat menarik untuk dikaji karena diperlukan guna melihat kualitas kinerja Bupati Hj. Sri Mulyani yang harus mempertanggungjawabkan kinerjanya atas tugas-tugas pemerintahan yang harus dijalankan. Persepsi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten tersebut dapat membantu dalam melihat efektivitas kepemimpinan yang dijalankan oleh Bupati Hj. Sri Mulyani dalam memimpin pemerintahan di Kabupaten Klaten dalam posisi kekosongan Wakil Bupati. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Klaten juga memiliki persepsi tertentu atas kemampuan memimpin Hj. Sri Mulyani sebagai Bupati Kabupaten Klaten selama menyelenggarakan pemerintahannya berlangsung. Persepsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap kepemimpinan Bupati Hj. Sri

Mulyani tersebut dapat membantu untuk melihat pola hubungan eksekutif-legislatif daerah sehingga terbentuk *check and balance* antara Bupati Hj. Sri Mulyani sebagai lembaga eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga legislatif daerah di Kabupaten Klaten yang memiliki kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam membentuk pemerintahan daerah yang baik di Kabupaten Klaten.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif-kuantitatif yang dilakukan melalui pengisian angket/kuesioner yang dibuat dalam bentuk tabel dengan jawaban menggunakan tanda centang (checklist) dengan hanya menggunakan 4 (empat) kategori penilaian yakni Sangat Setuju, Setuju, Tidak Setuju, Sangat Tidak Setuju. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kabupaten Klaten, yakni di Kantor Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Klaten dan Kantor Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Klaten dengan subyek penelitian Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten, Staf Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Klaten, yakni dengan dilakukan sampling dengan teknik *propotional random sampling* dengan menggunakan perhitungan sampel Slovin dengan tingkat signifikan 10%, yakni 61 birokrasi dan 32 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Klaten. Kemudian dilakukan analisis berdasarkan pada hasil perhitungan yang diperoleh melalui perhitungan *SPSS 16.0 for windows dan Microsoft Excel 2010* untuk diketahui hasil penelitian mengenai persepsi Birokrasi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap kepemimpinan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Klaten pada periode 2017-2021.

## **Kerangka Teori**

### **1. Persepsi**

Toha (1999: 138) dalam (Sembiring, 2014) menyebutkan

bahwa yang dimaksud dengan persepsi adalah suatu proses yang dialami bagi masing-masing orang dalam memahami informasi dilingkungannya, yang dibantu oleh indera penglihatan, pendengaran, maupun perasaan. Wirawan (1995: 37) dalam (Sembiring, 2014) juga mengartikan bahwa persepsi adalah hasil dari suatu hubungan yang dilakukan antara manusia dengan lingkungannya secara sadar yang dipengaruhi oleh pengalaman, minat, sikap, maupun intelegensi yang hasilnya akan mempengaruhi tingkah laku. Yang menjadi kunci utama dari persepsi merupakan suatu penafsiran terhadap situasi bukan pernyataan terhadap situasi.

### **2. Efektivitas Kepemimpinan**

Yulk dalam (Muljono, 2015), memberikan penegasan bahwa efektivitas kepemimpinan dapat diukur berdasarkan kontribusi pemimpin terhadap kualitas proses kelompok yang dirasakan oleh para pengikut ataupun pengamatan dari luar.

Berdasarkan pada (Sari, 2015), Efektivitas kepemimpinan dapat diartikan sebagai keberhasilan seorang pemimpin dalam melakukan tugas kepemimpinannya dengan cara yang tepat berdasarkan pada indikator-indikatornya. Dimana tingkat efektivitas kepemimpinan itu merupakan hasil bersama antara pemimpin dengan pengikutnya. Seorang tidak akan mampu berbuat banyak tanpa melibatkan pengikutnya. Sebaliknya, pengikut tidak akan efektif dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya apabila tidak ada pengendalian, pengarahan, dan kerjasama dengan pemimpinnya. Melalui penelitian ini, efektivitas kepemimpinan dilihat melalui beberapa aspek-aspek kepemimpinan berikut:

a) Pengarahan

Pengarahan merupakan salah satu aspek dalam kepemimpinan yang bersifat memaksakan para bawahan untuk bersedia mengerti serta melaksanakan kewajibannya

secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan.

b) Motivasi

Motivasi merupakan salah satu aspek penting dalam kepemimpinan, dimana motivasi yang diberikan oleh pemimpin kepada bawahan sangat menentukan keberhasilan sebuah organisasi ataupun instansi oleh para pegawainya.

c) Pengambilan Keputusan

Kusnadi (2005) dalam (Rifa'i) menjelaskan bahwa proses pengambilan keputusan merupakan suatu proses penetapan dan pemilihan suatu alternatif dari beberapa alternatif yang tersedia, dengan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal.

### 3. Mekanisme *Check and Balances*

Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa hubungan antara pemerintah daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan hubungan kerja yang sifatnya kemitraan, yang berarti antara kedua lembaga tersebut perlu mengembangkan mekanisme *check and balances* antara eksekutif daerah dengan legislatif daerah. Kemitraan yang strategis antara Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memungkinkan terjadinya *check and balances* menuju tercapainya tata pemerintahan yang baik (Nawawi, 2015). Mekanisme Check and balances dalam penelitian ini berkaitan dengan pola perilaku kepemimpinan pemerintahan, sebagai berikut (Kaloh, 2003):

- a) Perilaku Kepemimpinan Kepala Daerah yang Memiliki Akuntabilitas Publik  
Akuntabilitas publik Kepala Daerah bertujuan untuk menjawab/menerangkan

kinerja ataupun tindakan yang dilakukan kepada masyarakat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yakni berupa keterangan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

- b) Perilaku Kepemimpinan Kepala Daerah yang Membangun Networking (Jejaring Kerja)  
Jejaring kerja yang dibentuk dalam pengelolaan pemerintah daerah dilakukan dengan tukar menukar pengalaman atau ide atau membangun kerjasama diantara masing-masing pemerintah daerah antara individu ataupun seluruh *stakeholder* yang ada di daerah.

## **Pembahasan**

### **1. Kepemimpinan Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Klaten pada Periode 2017-2021 menurut Persepsi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten**

Pada sub bab ini berisi pembahasan mengenai persepsi para aparatur birokrasi terhadap kepemimpinan Bupati Hj. Sri Mulyani sebagai Kepala Daerah Kabupaten Klaten dalam menyelenggarakan pemerintahan di Kabupaten Klaten selama masa kepemimpinannya pada periode 2017-2021, yang dilihat dari beberapa aspek kepemimpinannya, yakni dalam memberikan pengarahan, memberikan motivasi, serta dalam proses pengambilan keputusan.

#### **a. Pengarahan**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 53 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi

serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten, Kepala Daerah Kabupaten Klaten berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom, sehingga memiliki wewenang untuk memberikan pengarahan kepada seluruh perangkat daerah yang bekerja dibawah tanggungjawabnya dalam membantu melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sehingga pelaksanaan pemerintahan tersebut dapat sesuai dengan arah dan tujuan organisasi. Pada aspek pengarahan dilihat dari 4 (empat) indikator, yakni pemberian perintah, pemberian instruksi, pembinaan, serta memberikan arahan. Hasil rekapitulasi jawaban responden dari aspek



pengarahan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.1**  
**Rekapitulasi Hasil Pengujian**  
**Statistik Deskriptif pada Aspek**  
**Pengarahan**

<b>Indikator</b>	<b>N</b>	<b>Min.</b>	<b>Max.</b>	<b>Mean</b>
Pemberian perintah	61	2,67	3,89	3,17
Pemberian instruksi	61	2,33	3,83	3,02
Pembinaan	61	2,14	3,71	3,06
Memberikan arahan	61	2,50	3,75	3,07
<b>Total Pengarahan</b>	<b>61</b>	<b>2,60</b>	<b>3,70</b>	<b>3,09</b>
Valid N (listwise)	61			

Hasil pengujian statistik deskriptif pada tabel di atas menunjukkan bahwa dari masing-masing indikator mempunyai rata-rata jawaban responden secara keseluruhan, yakni indikator pemberian perintah mempunyai rata-rata 3,17 indikator pemberian instruksi mempunyai rata-rata 3,02, indikator pembinaan mempunyai rata-rata 3,06, dan indikator memberikan arahan mempunyai rata-rata 3,75 Secara keseluruhan hasil uji statistik pada indikator ini mendapatkan hasil perhitungan nilai minimum 2,60,

nilai maksimum 3,70 dan total rata-rata jawaban responden untuk aspek pengarahan menghasilkan angka 3,09 sehingga dapat disimpulkan bahwa Persepsi Birokrasi terhadap kepemimpinan Bupati Hj. Sri Mulyani dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Klaten pada periode 2017-2021 pada aspek pengarahan dikategorikan baik.

- a) Bupati Hj. Sri Mulyani dalam memberikan perintah kepada bawahan menunjukkan sikap yang cakap serta santun. Perintah disesuaikan dengan kapasitas pegawai tentunya perintah tersebut mencerminkan nilai-nilai kebaikan secara moral, agama, serta hukum yang berlaku dilingkungan organisasi, penugasan disesuaikan dengan RPJMD dan mengutamakan target serta sasaran yang ditetapkan sebelumnya.
- b) Bupati Hj. Sri Mulyani dalam memberikan instruksi kepada bawahan yakni bersikap tegas dan menyampaikan dengan baik sehingga para birokrasi

mampu menghasilkan kinerja yang diinginkan.

- c) Bupati Hj. Sri Mulyani dalam memberikan pembinaan bersikap terbuka, yakni memberi kesempatan kepada bawahan sesuai kemampuan mereka dan tidak memberatkan. Mampu membimbing bawahan atas tugas yang harus dilakukan dan bersedia membantu ketika terdapat kesulitan. Bupati Hj. Sri Mulyani juga pernah mengadakan pelatihan untuk menggali bakat dan keahlian pegawai, kedekatan dengan bawahan dibentuk dengan menjalin rasa saling percaya.
- d) Bupati Hj. Sri Mulyani dalam memberikan arahan selalu mengutamakan kerjasama, yakni baik dalam penyampaiannya sehingga arahan mampu dimengerti. Saran dan nasihat seringkali diberikan dan tetap bersikap baik apabila bawahan ada yang menolak penugasan tersebut sehingga tidak pernah terjadi pertentangan diantara

keduanya. Meskipun memimpin tanpa seorang wakil bupati, semua arahan terlaksana dan tidak pernah menyulitkan para bawahannya.

## **b. Motivasi**

Dalam suatu organisasi, termasuk organisasi pemerintahan, peran pemimpin sangat penting untuk memengaruhi emosi para bawahannya, dimana Kepala Daerah perlu menggunakan perilaku motivasi untuk merealisasikan seluruh tugas dan tanggung jawabnya. Karena pada dasarnya perilaku motivasi ditujukan untuk mendorong gairah kerja bawahan, mendisiplinkan bawahan, serta memberikan apresiasi kepada bawahan. Sesuai dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 53 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah

Kabupaten Klaten, Kepala Daerah Kabupaten Klaten berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom, sehingga berperan penting dalam memberikan motivasi kepada bawahan, karena bagaimanapun motivasi tersebut sangat berpengaruh terhadap kinerja pegawai, mengingat seorang bawahan selalu berorientasi terhadap pemimpinnya.

Dalam penelitian ini, untuk mengetahui persepsi Birokrasi terhadap kepemimpinan Kepala Daerah Kabupaten Klaten pada periode 2017-2021, pada aspek motivasi dilihat dari 3 (tiga) indikator, yakni memberikan contoh kepada bawahan, mendorong gairah kerja bawahan, dan memberikan apresiasi/penghargaan kepada bawahan. Untuk lebih jelasnya hasil rekapitulasi jawaban

responden dari aspek pengarahannya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.2**  
**Rekapitulasi Hasil Pengujian**  
**Statistik Deskriptif pada Aspek**  
**Motivasi**

<b>Indikator</b>	<b>N</b>	<b>Min.</b>	<b>Max.</b>	<b>Mean</b>
Memberikan contoh kepada bawahan	61	1,83	4,00	3,05
Mendorong gairah kerja	61	1,00	4,00	2,90
Memberikan apresiasi/penghargaan	61	1,00	4,00	2,65
<b>Total Motivasi</b>	<b>61</b>	<b>1,60</b>	<b>4,00</b>	<b>2,96</b>
Valid N (listwise)	61			

Hasil pengujian statistik deskriptif pada tabel di atas menunjukkan bahwa dari masing-masing indikator mempunyai rata-rata jawaban responden secara keseluruhan, yakni indikator memberikan contoh kepada bawahan mempunyai rata-rata 3,05, indikator mendorong gairah kerja bawahan mempunyai rata-rata 2,90, dan indikator

memberikan apresiasi/penghargaan kepada bawahan mempunyai rata-rata 2,65. Secara keseluruhan hasil uji statistik pada indikator ini mendapatkan hasil perhitungan nilai minimum 1,60, nilai maksimum 4,00 dan total rata-rata jawaban responden untuk aspek motivasi menghasilkan angka 2,967, sehingga dapat disimpulkan bahwa persepsi birokrasi terhadap kepemimpinan Bupati Hj. Sri Mulyani dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Klaten pada periode 2017-2021 pada aspek motivasi dikategorikan baik.

a) Bupati Hj. Sri Mulyani mencerminkan sikap yang baik, komunikatif, dan terbuka kepada bawahan. Komitmen akan disiplin waktu menjadi kebiasaan baik yang dicontohkan dan Beliau tidak pernah

membeda-bedakan antar bawahan, justru bersikap mengayomi sehingga tercipta situasi kerja yang kondusif.

b) Bupati Hj. Sri Mulyani selalu memberikan dorongan kepada bawahan, menggerakkan bawahan sesuai dengan visi dan misi, sehingga tercipta gairah kerja yang positif. Upaya yang ditunjukkan untuk mendorong kinerja bawahan yakni melakukan pendekatan dengan meluangkan waktunya untuk mengunjungi para bawahannya.

c) Bupati Hj. Sri Mulyani dalam mendorong prestasi para bawahannya dengan cara memberikan apresiasi/reward kinerja yang baik yang dicapai oleh bawahannya.

### c. **Pengambilan Keputusan**

Pengambilan keputusan merupakan salah satu tanggung jawab seorang Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga selain memiliki kemampuan untuk mengarahkan dan memotivasi, seorang Kepala Daerah harus memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah dengan cara yang berkualitas dan kompeten. Pengambilan keputusan merupakan kunci dari proses kepemimpinan.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 53 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten, Kepala Daerah Kabupaten Klaten berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

otonom, sehingga memiliki tanggungjawab untuk melakukan pengambilan keputusan berupa kebijakan-kebijakan dalam rangka untuk menangani seluruh permasalahan yang terjadi di daerah Kabupaten Klaten, termasuk masalah dibidang kelembagaan, kepegawaian, keuangan, pelayanan masyarakat, dan lain-lain sebagai bagian dari kompleksitas penyelenggaraan pemerintahan.

Pada aspek pengambilan keputusan, dilihat dari indikator proses penetapan kebijakan yang dilakukan. Untuk lebih jelasnya hasil rekapitulasi jawaban responden dari aspek pengambilan keputusan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.3**  
**Rekapitulasi Hasil Pengujian**  
**Statistik Deskriptif pada Aspek**  
**Pengambilan Keputusan**

<b>Indikator</b>	<b>N</b>	<b>Min.</b>	<b>Max.</b>	<b>Mean</b>
Total Pengambilan Keputusan	61	1,70	3,90	3,0852
Valid N (listwise)	61			

Hasil pengujian statistik deskriptif pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai rata-rata pengambilan keputusan sebesar 3,08. Nilai minimum pengambilan keputusan sebesar 1,7 dan nilai maksimumnya sebesar 3,9. Nilai rata-rata sebesar 3,08 yang berarti dapat disimpulkan bahwa persepsi birokrasi terhadap kepemimpinan Bupati Hj. Sri Mulyani dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Klaten pada periode 2017-2021 pada aspek pengambilan keputusan dikategorikan baik.

Sikap yang ditunjukkan Bupati Hj. Sri Mulyani dalam proses menetapkan keputusan yakni:

- a) Bersikap terbuka (menerima saran dan pendapat);
- b) Bersikap percaya diri;
- c) Mengutamakan kepentingan umum;
- d) Berani mengambil keputusan secara tepat dan cepat;
- e) Tegas dalam situasi apapun;
- f) Memiliki kualitas cara pemecahan masalah dengan baik;
- g) Mampu menghasilkan satu pilihan final; dan
- h) Mengutamakan sikap adil dan berlapang dada.

## **2. Kepemimpinan Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Klaten pada Periode 2017-2021 menurut Persepsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Klaten**

Pada sub bab ini berisi pembahasan mengenai persepsi para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap kepemimpinan Bupati Hj. Sri Mulyani sebagai Kepala Daerah dalam menyelenggarakan

pemerintahan di Kabupaten Klaten selama masa kepemimpinannya pada periode 2017-2021, dilihat dari beberapa aspek kepemimpinannya, yakni dalam membangun *networking* (jejaring kerja) dan akuntabilitas Bupati Hj. Sri Mulyani terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

**a. Membangun *Networking* (Jejaring Kerja)**

Salah satu pihak yang penting bagi pemerintah daerah untuk membangun jejaring kerja, yakni dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), karena sebagai pihak yang merupakan salah satu unsur yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan oleh Kepala Daerah melalui peran dan fungsi yang dimilikinya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Klaten sebagai mitra kerja dari Kepala Daerah Kabupaten Klaten bertugas melakukan pengawasan atas tindakan

pemerintah daerah Kabupaten Klaten. Untuk itu dalam penelitian ini, berdasarkan pada kuesioner yang telah disebar dan diisikan oleh Responden, untuk mengetahui persepsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

terhadap kepemimpinan Kepala Daerah Kabupaten Klaten dilihat dari aspek membangun *networking* (jejaring kerja), yang dilihat pada 2 (dua) indikator, yakni menjalin hubungan sebagai mitra kerja serta menjalin hubungan komunikasi dan tukar menukar informasi.

Melalui penelitian ini dapat diketahui hasilnya yakni mengenai persepsi Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Klaten atas upaya kepemimpinan Hj. Sri Mulyani sebagai Bupati selama menyelenggarakan pemerintahannya di Kabupaten Klaten pada periode 2017-2021. Untuk lebih jelasnya hasil rekapitulasi jawaban

responden dari aspek membangun networking (jejaring kerja) dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.4**  
**Rekapitulasi Hasil Pengujian Statistik**  
**Deskriptif pada Aspek Membangun**  
**Networking (Jejaring Kerja)**

<b>Indikator</b>	<b>N</b>	<b>Min.</b>	<b>Max.</b>	<b>Mean</b>
Menjalin hubungan sebagai mitra kerja	32	2,57	4,00	3,3797
Menjalin komunikasi dan tukar menukar informasi	32	2,00	4,00	3,2031
<b>Total membangun networking</b>	<b>32</b>	<b>2,45</b>	<b>4,00</b>	<b>3,3153</b>
Valid N (listwise)	32			

Hasil pengujian statistik deskriptif pada tabel di atas menunjukkan bahwa dari masing-masing indikator mempunyai rata-rata jawaban responden secara keseluruhan, yakni indikator menjalin hubungan sebagai mitra kerja mempunyai rata-rata 3,3797 dan indikator Menjalin komunikasi dan tukar menukar informasi mempunyai rata-rata

3,2031. Secara keseluruhan hasil uji statistik pada indikator ini mendapatkan hasil perhitungan nilai minimum 2,45, nilai maksimum 4,00 dan total rata-rata jawaban responden untuk aspek membangun networking (jejaring kerja) menghasilkan angka 3,3153 sehingga dapat disimpulkan bahwa persepsi Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) terhadap kepemimpinan Bupati Hj. Sri Mulyani dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Klaten pada periode 2017-2021 pada aspek membangun networking (jejaring kerja) dikategorikan baik.

- a) Bupati Hj. Sri Mulyani mampu menjalin kerjasama yang baik dengan seluruh anggota DPRD sebagai mitra kerja. Dalam melaksanakan urusan pemerintahan selalu dibawah persetujuan dan pengawasan DPRD,



sehingga menghasilkan proses akuntabilitas yang baik dan mampu menggali aspirasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah.

- b) Bupati Hj. Sri Mulyani membangun komunikasi yang baik dengan seluruh anggota DPRD, membangun rasa saling percaya dan saling tukar menukar informasi.

#### **b. Akuntabilitas**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 32 ayat (3) tentang Pemerintahan Daerah bahwa Bupati/Walikota sebagai Kepala Daerah Kabupaten/Kota dalam menjalankan tugas dan kewenangannya bertanggungjawab kepada DPRD Kabupaten/Kota. Sehingga berdasarkan Undang-Undang tersebut, Kepala Daerah Kabupaten Klaten berkewajiban melakukan

pertanggungjawaban kepada DPRD Kabupaten Klaten. Dimana dalam hal ini berarti upaya penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Kepala Daerah Kabupaten Klaten harus benar-benar dipertanggungjawabkan kepada rakyat melalui DPRD Kabupaten Klaten. Untuk itu bentuk pertanggungjawaban tersebut dibangun bersama-sama antara eksekutif dengan legislatif guna menjamin kepentingan dan kesejahteraan rakyat daerah.

Dalam penelitian ini, berdasarkan pada kuesioner yang telah disebar dan diisikan oleh responden, untuk mengetahui persepsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap kepemimpinan Kepala Daerah Kabupaten Klaten dari aspek akuntabilitas yang didalamnya terdiri atas 3 (tiga) indikator, yakni Kepala Daerah dalam menyerahkan laporan pertanggungjawaban, penggunaan anggaran, serta

kebijakan yang ditetapkan dengan DPRD Kabupaten Klaten. Untuk lebih jelasnya hasil rekapitulasi jawaban responden dari aspek akuntabilitas dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.5**  
**Rekapitulasi Hasil Pengujian**  
**Statistik Deskriptif pada Aspek**  
**Akuntabilitas**

<b>Indikator</b>	<b>N</b>	<b>Min.</b>	<b>Max.</b>	<b>Mean</b>
Menyerahkan laporan pertanggungjawaban	32	1,75	4,00	3,1563
Penggunaan anggaran	32	2,00	4,00	3,0938
Kebijakan yang ditetapkan	32	2,50	4,00	3,4141
<b>Total Akuntabilitas</b>	<b>32</b>	<b>2,11</b>	<b>3,89</b>	<b>3,2644</b>
Valid N (listwise)	32			

Hasil pengujian statistik deskriptif pada tabel di atas menunjukkan bahwa dari masing-masing indikator mempunyai rata-rata jawaban responden secara keseluruhan, yakni indikator menyerahkan laporan pertanggungjawaban mempunyai rata-rata 3,1563, indikator penggunaan anggaran

mempunyai rata-rata 3,0938, dan indikator kebijakan yang ditetapkan mempunyai rata-rata 3,4141. Secara keseluruhan hasil uji statistik pada indikator ini mendapatkan hasil perhitungan nilai minimum 2,11, nilai maksimum 3,89 dan total rata-rata jawaban responden untuk aspek akuntabilitas menghasilkan angka 3,2644 dengan standar deviasi 0,419 sehingga dapat disimpulkan bahwa persepsi Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) terhadap kepemimpinan Bupati Hj. Sri Mulyani dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Klaten pada periode 2017-2021 pada aspek akuntabilitas dikategorikan baik.

- a) Bupati Hj. Sri Mulyani mampu melaksanakan tugasnya secara maksimal meskipun memimpin tanpa kedudukan Wakil Bupati, seluruh tugas dan tanggungjawabnya tetap terkontrol dengan baik

sehingga hasil LPJ mampu mempertimbangkan dampak ekonomis, sosial, dan politis, dan selalu disiplin waktu dalam menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada DPRD.

- b) Bupati Hj. Sri Mulyani dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di Kabupaten Klaten sepenuhnya menerapkan anggaran kinerja dengan indikator keberhasilan yang jelas.
- c) Dalam menetapkan kebijakan daerah bersama dengan DPRD, Bupati Hj. Sri Mulyani selalu bersinergi dengan seluruh anggota DPRD Kabupaten Klaten, aktif dalam berpendapat, dan mengutamakan visi dan misi organisasi pada setiap kebijakan yang diusulkan.

### **Kesimpulan**

Hasil rekapitulasi dari Persepsi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat

Daerah Kabupaten Klaten diperoleh rata-rata jawaban responden 3,06 dengan nilai maksimum 3,64 dan nilai minimum 2,32 yakni masuk dalam kategori Baik. Artinya berdasarkan pada persepsi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten, Bupati Hj. Sri Mulyani memiliki kualitas kinerja yang baik, dilihat dari aspek pengarah, motivasi, dan pengambilan keputusan sehingga mampu menciptakan efektivitas kepemimpinan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Klaten dengan posisi kekosongan Wakil Bupati. Sedangkan persepsi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Klaten berdasarkan pada rekapitulasi jawaban responden menunjukkan rata-rata 2,74 dengan nilai maksimum 3,29 dan nilai minimum 1,92 masuk dalam kategori Baik. Artinya berdasarkan Persepsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang berkedudukan sebagai lembaga legislatif juga menunjukkan pola hubungan yang baik dengan Bupati Hj. Sri Mulyani, artinya mekanisme *check and balance* dalam

membentuk pemerintahan daerah berjalan dengan baik terutama berkaitan dengan laporan pertanggungjawaban Bupati kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Klaten.

### **Saran**

Mengingat urgensinya pengisian jabatan wakil bupati dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka sebaiknya dilakukan pemilihan untuk wakil bupati Kabupaten Klaten pada periode 2017-2021 sesuai dengan mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sehingga Bupati Hj. Sri Mulyani dalam melaksanakan urusan pemerintahannya hingga masa kepemimpinannya berakhir tetap berjalan sesuai dengan yang semestinya, yakni terdapat kedudukan Wakil Bupati yang bertanggungjawab membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Sehingga dalam menjalankan tugasnya

menyelenggarakan pemerintahan di Kabupaten Klaten pembagian kewenangan akan lebih jelas.

### **Kelemahan Studi**

Persepsi Birokrasi dalam penelitian ini hanya menunjukkan persepsi birokrasi dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten saja, sehingga belum mencakup birokrasi secara keseluruhan yakni seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Klaten dalam menunjukkan persepsi terhadap kepemimpinan Bupati Hj. Sri Mulyani dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Klaten untuk Periode 2017-2021, sehingga untuk penelitian selanjutnya disarankan bisa mencakup birokrasi secara keseluruhan di Kabupaten Klaten.

### **Daftar Pustaka**

- Asep, S., Fatchurahman, H., & Supardi. (2017, Juni). "Pemimpin yang Melayani dalam Membangun Bangsa yang Mandiri". *Anterior Jurnal*, 16(2), 91-92.
- Djaenuri, A. (2015). "Kepemimpinan, Etika, dan Kebijakan

- Pemerintahan*". Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hidayati. (2012, Maret). "Analisis Gaya Kepemimpinan Rusli Zainal sebagai Kepala Pemerintahan Provinsi Riau". *Jurnal Kajian Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 21.
- JatengPos. (2017, November 13). "Sri Hartini Didefinisikan Akhir Bulan". Dipetik Agustus 7, 2019, dari <http://jatengpos.co.id/sri-hartini-didefinisikan-akhir-bulan/>
- Kaloh, D. J. (2003). *"Kepala Daerah: Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah"*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kusnaedi, D. (2017, Januari 5). "Sri Mulyani Pun Gantikan Sri Hartini sebagai Plt Bupati Klaten". Dipetik Agustus 7, 2019, dari Berita Aktual: <https://aktual.com/sri-mulyani-gantikan-sri-hartini-plt-bupati-klaten/>
- Liputan6. (2016). "VIDEO: Bupati Wakil Bupati Perempuan Pertama Raih Muri". Dipetik Agustus 7, 2019, dari Liputan6.com: <https://m.liputan6.com/news/read/2439959/video-bupati-wakil-bupati-perempuan-pertama-raih-muri>
- Muljono, H. d. (2015, Oktober). Studi Efektivitas Kepemimpinan Kepala Sekolah. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, XXII(2).
- Nawawi, J. (2015). "Analisis Hubungan DPRD dan Pemerintah Daerah dalam Pembuatan Kebijakan Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat". *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8(1).
- Octavina, M. A., Suryadi, & Rengu, S. P. (t.thn.). "Kepemimpinan Bupati dalam Meningkatkan Pembangunan (Studi tentang Kepemimpinan Bupati di Kabupaten Bangkalan 2003-2013)". *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1(5), 911.
- Rifa'i, A. (t.thn.). Proses Pengambilan Keputusan.
- Sahertian, P. (2010). "Perilaku Kepemimpinan Berorientasi Hubungan dan Tugas sebagai Anteseden Komitmen Organisasional, Self Efficacy, dan Organizational Citizenship Behavior (OCB)". *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 12(2), 158.
- Sari, D. P. (2015). Efektivitas Kepemimpinan dalam rangka Meningkatkan Komitmen Organisasi di PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero).
- Sembiring, W. M. (2014). "Persepsi Konstituen Terhadap Anggota DPRD dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat". *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, 2(2), 122.